
ANALISIS PERAN ANGGARAN KEPARIWISATAAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH PADA SEKTOR PARIWISATA KEK MANDALIKA

***Khaerul Umam¹, Reny Wardiningsih², Lalu Andika Noviawan³**

¹Universitas Mataram

¹Universitas Mataram

¹Universitas Mataram

***Coessponding email: khaerulumam20@staff.unram.ac.id**

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika merupakan proyek strategis nasional yang difokuskan pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran anggaran dinas teknis, khususnya Dinas Pariwisata, dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis data anggaran, statistik kunjungan wisatawan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan pada alokasi anggaran serta jumlah kunjungan wisatawan selama periode 2020–2024. Namun, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD belum menunjukkan hasil optimal karena lemahnya pencatatan pajak, potensi kebocoran retribusi, serta rendahnya tingkat hunian wisatawan di sekitar KEK Mandalika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas anggaran pariwisata sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran program, kualitas implementasi, serta sinergi lintas sektor. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya perencanaan anggaran berbasis output, digitalisasi sistem penerimaan daerah, serta penguatan peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan destinasi unggulan secara berkelanjutan.

Kata Kunci : *anggaran pariwisata, KEK Mandalika, PAD, pembangunan daerah, efektivitas anggaran*

PENDAHULUAN

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014. Terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, KEK Mandalika mencakup area seluas 1.035,67 hektare dengan fokus utama pada pengembangan sektor pariwisata. Peresmian kawasan ini oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 menjadi tonggak penting dimulainya operasional KEK Mandalika yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan pendapatan daerah.

Sebagai proyek strategis nasional, KEK Mandalika telah mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan dari pemerintah pusat. Tercatat, dari tahun 2020 hingga 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dikeluarkan mencapai Rp1,3 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendukung, promosi pariwisata, dan penyelenggaraan event-event berskala nasional maupun internasional, seperti MotoGP dan World Superbike (WSBK).

Namun demikian, realisasi dampak ekonomi terhadap peningkatan pendapatan daerah belum menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, pendapatan daerah pada tahun 2023 hanya meningkat sebesar Rp35,32 miliar, dari Rp238,78 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp274,11 miliar. Bahkan, pada tahun 2021, pendapatan daerah sempat mengalami penurunan sebesar Rp72,42 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pembangunan KEK telah berjalan.

Disparitas antara besarnya nilai investasi dan kontribusi terhadap pendapatan daerah menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengelolaan anggaran, khususnya anggaran kepariwisataan. Minimnya dampak langsung terhadap sektor ekonomi lokal juga terlihat dari rendahnya tingkat hunian hotel di kawasan sekitar selama event MotoGP 2024, di mana hingga H-1 penyelenggaraan, penjualan tiket baru mencapai 46% dari target. Mayoritas hunian hotel justru ditempati oleh tim pembalap, sementara wisatawan umum kesulitan mendapatkan akomodasi dan memilih menginap di luar kawasan KEK, seperti di Kota Mataram dan Senggigi.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa potensi ekonomi dari sektor pariwisata belum sepenuhnya dimaksimalkan. Padahal, keberadaan KEK Mandalika semestinya menjadi peluang strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Penelitian Noviaristi (2023) menunjukkan bahwa penetapan suatu daerah sebagai kawasan ekonomi khusus dapat mendorong tren kemandirian keuangan daerah yang positif. Namun demikian, pencapaian tersebut

memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara tepat dan strategis.

Dinas Pariwisata sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pengembangan sektor pariwisata, memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa alokasi anggaran kepariwisataan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai aktor utama pengembangan KEK Mandalika, dituntut untuk merancang program dan kegiatan yang tepat sasaran, yang tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga mampu menarik wisatawan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana peran anggaran kepariwisataan dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah pada sektor pariwisata KEK Mandalika?"

TINJAUAN PUSTAKA

KEK Mandalika merupakan objek pariwisata pemerintah kabupaten lombok tengah. Berdasarkan hal tersebut, menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga, mengelola, mengembangkan dan memajukan aset tersebut dengan sumber daya yang ada. Secara teori dan regulasi, Pemerintah kabupaten lombok tengah mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan tugas tersebut.

1. Anggaran pemerintah Daerah

Anggaran daerah merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Menurut Halim (2007), anggaran daerah merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, yang mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang fiskal. Fungsi utama dari anggaran daerah antara lain sebagai alat perencanaan, pengendalian, alokasi sumber daya, serta akuntabilitas publik. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan menggunakan anggarannya sesuai dengan prioritas pembangunan wilayahnya masing-masing.

Anggaran pemerintah daerah terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Komponen belanja dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung berkaitan langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk pembangunan infrastruktur dan sektor pariwisata. Sementara itu, belanja tidak langsung meliputi gaji pegawai, subsidi, dan transfer antar pemerintah. Keberhasilan pengelolaan anggaran dapat dilihat dari sejauh mana realisasi belanja dapat menciptakan output dan outcome yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor unggulan seperti pariwisata.

Peran dinas teknis dalam pengelolaan anggaran sangat strategis, karena instansi ini bertanggung jawab pada pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dapat mengelola anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang menunjang aksesibilitas wisata, sementara Dinas Pariwisata bertugas dalam promosi dan pengembangan destinasi. Oleh karena itu, efektivitas belanja dinas teknis menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan anggaran daerah dalam mendorong sektor prioritas seperti kepariwisataan.

2. Konsep kepariwisataan

Pariwisata merupakan suatu fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan pergerakan orang ke tempat-tempat di luar lingkungan tempat tinggalnya untuk tujuan pribadi maupun bisnis, serta untuk jangka waktu tertentu (UNWTO, 2021). Menurut Yoeti (1996), pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke tempat lain dengan tujuan rekreasi, relaksasi, atau kepentingan lainnya. Aktivitas pariwisata melibatkan berbagai sektor pendukung seperti transportasi, akomodasi, kuliner, hingga hiburan. Oleh karena itu, pariwisata memiliki sifat multidimensional dan memerlukan sinergi dari berbagai pihak dalam pengembangannya.

Jenis-jenis pariwisata dapat diklasifikasikan menjadi pariwisata alam, budaya, dan buatan. Di kawasan seperti KEK Mandalika, potensi wisata alam seperti pantai dan laut menjadi daya tarik utama yang kemudian dikembangkan menjadi atraksi wisata dengan dukungan infrastruktur dan promosi yang memadai. Selain itu, pariwisata juga dapat dikembangkan melalui penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional, seperti WSBK dan MotoGP yang berkontribusi dalam meningkatkan citra destinasi dan kunjungan wisatawan. Untuk mengukur perkembangan pariwisata, indikator yang umum digunakan meliputi jumlah wisatawan, lama tinggal, tingkat okupansi hotel, dan pengeluaran rata-rata wisatawan.

Pengembangan pariwisata memerlukan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu teori yang sering dijadikan acuan adalah teori siklus hidup destinasi wisata (*Tourism Area Life Cycle*) yang dikemukakan oleh Butler (1980), yang menjelaskan bahwa setiap destinasi pariwisata akan mengalami tahap eksplorasi, pengembangan, kematangan, dan penurunan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pengembangan destinasi dengan cara menyediakan infrastruktur, melakukan promosi yang efektif, serta mengelola dampak sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, sinergi antara anggaran publik dan strategi

pengembangan destinasi menjadi sangat krusial. Berdasarkan hasil penelitian Vinuzia (2023) juga menunjukkan bahwa pariwisata memberikan kontribusi yang baik pada PAD Kab. Lombok Tengah namun pengembangannya belum maksimal oleh karena kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat belum berjalan dengan baik dan keberadaan tempat wisata tidak dapat dioptimalkan oleh pemerintah pusat, sehingga proses pembangunan perlu melibatkan pemerintah daerah agar sarana dan prasarana yang telah dibangun dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

3. Keterkaitan Anggaran dan Pengembangan pariwisata

Anggaran publik, khususnya anggaran pemerintah daerah, memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata. Menurut Mardiasmo (2002), anggaran daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya sektor unggulan seperti pariwisata. Dalam konteks ini, alokasi anggaran diarahkan untuk mendanai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur destinasi, promosi wisata, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kualitas layanan publik. Dukungan anggaran yang memadai akan memperkuat daya saing destinasi wisata dan menciptakan *multiplier effect* terhadap ekonomi lokal. Penelitian Masrun, dkk (2022) menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan Usaha Mikro dan Kecil di KEK Mandalika.

Investasi pemerintah melalui belanja daerah berperan sebagai pemicu awal (stimulus) dalam pengembangan pariwisata, terutama di daerah-daerah yang baru bertumbuh seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dalam studi oleh Bappenas (2019), dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan air bersih, listrik, dan fasilitas publik yang dibiayai oleh anggaran pemerintah merupakan faktor utama dalam menarik investasi swasta di sektor pariwisata. Selain itu, anggaran promosi wisata dan pelatihan bagi pelaku usaha lokal juga turut menciptakan ekosistem pariwisata yang produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi krusial dalam menciptakan dampak nyata terhadap sektor ini.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pengeluaran pemerintah di sektor pariwisata dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan serta pendapatan daerah. Misalnya, studi oleh Rahmawati & Gunawan (2021) yang menganalisis data belanja pariwisata di beberapa kabupaten di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan belanja promosi dan pembangunan destinasi berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wisatawan dan PAD dari sektor tersebut. Temuan ini memperkuat pentingnya perencanaan anggaran yang berbasis pada kebutuhan lapangan dan potensi daerah. Dengan demikian, anggaran tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis pariwisata. Sehingga kebutuhan

akomodasi untuk wisatawan asing dapat terpenuhi karena hal tersebut dapat mempengaruhi PAD pemerintah daerah setempat. Irvan, M dkk (2022).

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan utama pemerintah daerah yang berasal dari potensi ekonomi lokal, termasuk sektor pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD mencakup pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam konteks pariwisata, sumber PAD dapat berasal dari pajak hotel dan restoran, retribusi tempat wisata, parkir, serta izin usaha pariwisata. Oleh karena itu, sektor pariwisata memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kemampuan fiskal suatu daerah.

Peningkatan aktivitas pariwisata secara umum akan mendorong naiknya jumlah wisatawan, konsumsi lokal, dan transaksi ekonomi di sekitar destinasi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penerimaan PAD. Inayati dan Lalu W (2020) mengemukakan bahwa jumlah wisatawan, jumlah objek wisata berpengaruh positif terhadap PAD Kab. Lombok Tengah. Dengan dikembangkannya KEK Mandalika, maka hal itu akan berdampak pada peningkatan daerah. Gusti Lanang Ardana dkk (2018) menemukan bahwa dengan pengembangan KEK Mandalika berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Tengah. Studi oleh Suartika (2019) menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dengan pertumbuhan PAD dari pajak hotel dan restoran di daerah tujuan wisata utama. Selain itu, dengan berkembangnya kawasan wisata seperti KEK Mandalika, pemerintah daerah memiliki peluang untuk meningkatkan retribusi jasa lingkungan, parkir, dan pelayanan umum lainnya. Namun, optimalisasi penerimaan ini sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan, sistem pencatatan, dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Perbandingan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebelum dan sesudah adanya intervensi kebijakan atau pengembangan kawasan wisata tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini, belanja daerah yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi, dan peningkatan pelayanan publik akan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan menarik lebih banyak wisatawan. Jika dikelola secara berkelanjutan, pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang stabil dan strategis bagi daerah. Oleh karena itu, pengukuran kontribusi pariwisata terhadap PAD tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga harus dilihat dari sisi efektivitas kebijakan fiskal yang mendukung sektor tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana anggaran kepariwisataan dialokasikan, dikelola, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah di sektor pariwisata, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Teori yang digunakan sebagai landasan analisis adalah teori biaya-manfaat (*Cost-Benefit Analysis*), untuk mengeksplorasi persepsi pemangku kepentingan terhadap efektivitas dan nilai manfaat dari belanja anggaran di sektor pariwisata. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta dengan melakukan konfirmasi hasil (*member check*) kepada para informan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan temuan.

PEMBAHASAN

1. Alokasi Anggaran Dinas Teknis terhadap Sektor Pariwisata

Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dalam lima tahun terakhir, terdapat tren peningkatan anggaran pada Dinas Pariwisata, yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pengembangan KEK Mandalika. Dalam periode tersebut, fluktuasi anggaran terjadi pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

No	Tahun	Anggaran
1	2020	6.997.185.269
2	2021	18.170.230.420
3	2022	27.214.909.477
4	2023	16.145.602.160
5	2024	16.936.508.981

Sumber : Dinas Pariwisata (data di olah)

Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, terdapat tren peningkatan anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah untuk

pengembangan KEK Mandalika. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata secara bertahap meningkatkan alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan penting yang mendukung pariwisata, termasuk promosi, penyelenggaraan event, dan pelatihan SDM bagi pelaku wisata. Berdasarkan data anggaran yang tercatat, pada tahun 2020, Dinas Pariwisata mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6.997.185.269. Anggaran tersebut meningkat secara signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp18.170.230.420, menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap sektor pariwisata yang semakin berkembang. Peningkatan anggaran ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp27.214.909.477 yang bersumber dari DAK Fisik. Namun, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.145.602.160, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dan penyesuaian prioritas. Meskipun demikian, pada tahun 2024 anggaran kembali meningkat menjadi Rp16.936.508.981, yang menunjukkan bahwa pengembangan KEK Mandalika tetap menjadi prioritas utama bagi Dinas Pariwisata dan pemerintah daerah.

Peningkatan dan fluktuasi anggaran ini mencerminkan perhatian yang berkelanjutan dan penyesuaian strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk mendukung pembangunan dan pengembangan destinasi wisata di KEK Mandalika.

Lebih lanjut, Pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pariwisata mengalokasikan dana yang menunjang kepariwisataan seperti promosi, penyelenggaraan event, dan pelatihan SDM bagi para pelaku wisata. Hal itu tercermin dalam program kerja dan kegiatan berikut:

No	Program	Kegiatan
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab. /Kota
3	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Sumber : Dinas Pariwisata (data diolah)

Peningkatan anggaran dinas pariwisata sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Namun, efektivitas pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti penyusunan program kerja dan kegiatan yang tidak langsung menyentuh akar permasalahan pariwisata, minimnya kreasi dan inovasi serta koordinasi antarinstansi khususnya dalam Pembangunan dan pengembangan KEK Mandalika yang belum optimal.

2. Dampak Penggunaan Anggaran terhadap Pengembangan KEK Mandalika

Penggunaan anggaran daerah oleh dinas teknis di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan sektor pariwisata. Berdasarkan data kunjungan wisatawan yang tercatat dari tahun ke tahun, terlihat adanya peningkatan yang sangat mencolok, terutama setelah pembangunan infrastruktur pendukung selesai dan berbagai event internasional seperti MotoGP dan WSBK dilaksanakan.

Tabel berikut menunjukkan jumlah pengunjung di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dan Provinsi NTB selama beberapa tahun terakhir:

No	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengunjung	377.684	338.299	483.022	1.019.617	1.490.740
NTB	3.372.698	3.138.788	4.091.259	12.922.404	13.769.746
Peringkat	4	4	4	8	3
Dari	KLU, Mataram, Lotim	Mataram, Lotim, KLU	Mataram, Lotim, KLU	Sumbawa, Mataram, Bima dll	Mataram dan Lobar

Sumber : BPS Provinsi NTB (data diolah)

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa jumlah pengunjung di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengalami peningkatan signifikan dari 377.684 pengunjung pada 2020 menjadi 1.490.740 pengunjung pada 2024. Begitu pula dengan jumlah pengunjung di Provinsi NTB, yang mengalami lonjakan luar biasa pada 2023 dengan 12.922.404 pengunjung, yang semakin menunjukkan daya tarik destinasi ini. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum yang bersih, serta promosi yang gencar yang meningkatkan daya tarik kawasan Mandalika, baik di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun, meskipun pencapaian ini patut diapresiasi, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena daerah ini masih kalah bersaing dibandingkan dengan wilayah lainnya di Lombok, seperti Lombok Barat, Kota Mataram, dan Lombok Timur, yang juga memiliki daya tarik wisata yang kuat. Meskipun terjadi lonjakan yang luar biasa pada tahun 2023, dari 4 ribuan menjadi 12 ribuan (tiga kali lipat), tetapi Lombok Tengah berada di urutan ke-2 terakhir. Oleh karena itu, selain anggaran, program, dan kegiatan pemerintah kabupaten Lombok Tengah khususnya dinas pariwisata harus berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan Kawasan wisata super prioritas tersebut. Hal itu akan terlihat dari beberapa aspek. Pertama, penting untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan infrastruktur, dengan memastikan bahwa fasilitas yang ada terus terjaga dan

dapat mengakomodasi lonjakan jumlah wisatawan yang terus meningkat, seperti yang terlihat pada data kunjungan pada 2024.

Selain itu, program pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) lokal, terutama di sektor perhotelan, kuliner, dan jasa wisata, perlu diperluas agar dapat mengatasi tantangan layanan wisata yang semakin berkembang. SDM lokal yang terlatih akan mampu memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi wisatawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepuasan dan mendatangkan wisatawan yang lebih banyak lagi.

Ke depannya, perencanaan anggaran daerah harus lebih terarah dan fokus pada kegiatan yang meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengembangan fasilitas tambahan, seperti area rekreasi, pusat informasi wisata, dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat memperpanjang masa tinggal wisatawan. Selain itu, penting juga untuk mengoptimalkan promosi pariwisata melalui platform digital dan kerja sama dengan agen perjalanan internasional untuk memperluas jangkauan pasar wisatawan mancanegara.

Peningkatan fasilitas penunjang, program pelatihan berkelanjutan, serta pengelolaan event yang lebih strategis dan terencana dapat menjadi langkah-langkah kunci dalam mempertahankan dan mempercepat pertumbuhan pariwisata di KEK Mandalika, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal serta kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

3. Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang tercatat pada Badan Pendapatan Daerah, sejak pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dipercepat, kontribusi pajak terhadap PAD meningkat rata-rata 10–15% per tahun. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif yang cukup besar dari sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Namun, meskipun ada peningkatan yang signifikan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD ini belum sepenuhnya optimal. Beberapa masalah yang masih dihadapi antara lain potensi kebocoran pajak dan retribusi, lemahnya sistem pencatatan digital, dan belum meratanya manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat lokal. Untuk itu, perlu adanya strategi pengelolaan PAD yang berbasis digital dan kebijakan yang lebih inklusif agar manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir pihak atau daerah tertentu.

Tabel berikut menunjukkan data kontribusi PAD berdasarkan jenis penerimaan dari tahun 2020 hingga 2024:

No	PAD Kab. Lombok Tengah (Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total	235,50	163,08	238,79	274,11	405,26

Pajak	61,89	78,13	190,14	147,24	182,33
Retribusi	18,38	29,18	34,37	20,82	25,00
% Pajak	26,28	47,91	79,63	53,71	44,99
% Retribusi	7,80	17,89	14,39	7,60	6,17

Sumber : Laporan Keuangan (data diolah)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD. Pada tahun 2022, misalnya, pajak menyumbang 79,63% dari total PAD, dengan nilai nominal mencapai 190,14 miliar. Angka ini menunjukkan adanya peran yang sangat besar dari sektor pajak, khususnya pajak hotel dan restoran yang berkaitan erat dengan sektor pariwisata. Namun, perlu dicatat bahwa pada tahun 2023, kontribusi pajak mengalami penurunan yang signifikan menjadi 53,71% atau sebesar 147,24 miliar. Penurunan ini dapat menunjukkan adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan atau ketidakteraturan dalam pencatatan pajak hotel dan restoran.

Pajak hotel, yang termasuk dalam pajak daerah, berperan sangat penting dalam mendongkrak PAD. Peningkatan jumlah pengunjung KEK Mandalika, terutama setelah pelaksanaan event-event internasional, seharusnya meningkatkan pendapatan dari pajak hotel. Namun, penurunan kontribusi pajak pada tahun 2023 perlu menjadi perhatian, terutama jika kita melihat bahwa sektor pariwisata mengalami lonjakan jumlah pengunjung yang signifikan pada tahun tersebut. Salah satu alasan penurunan tersebut mungkin disebabkan oleh kebocoran pajak, yang bisa terjadi jika ada pengelolaan pajak yang tidak optimal atau ketidakpatuhan pengusaha hotel dalam melaporkan omset mereka. Selain itu, kebocoran ini juga disebabkan oleh rendahnya minat wisatawan untuk menginap dan menetap di Kawasan wisata Lombok Tengah.

Untuk mengoptimalkan potensi pajak hotel, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pencatatan digital dan pengawasan terhadap pajak yang dipungut dari sektor pariwisata. Digitalisasi dalam sistem pajak akan memudahkan pemantauan dan pencatatan transaksi secara real-time, serta meminimalkan potensi kebocoran pajak. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran pengusaha hotel tentang kewajiban pajak mereka, melalui sosialisasi dan program pendampingan.

Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah juga harus merancang kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas dan daya saing sektor pariwisata, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan pendapatan pajak dari sektor hotel dan restoran. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan di hotel-hotel dan restoran yang ada, serta memperluas kerjasama dengan platform digital yang dapat mempermudah sistem pemesanan dan pembayaran, yang pada gilirannya akan mendukung pencatatan pajak secara lebih akurat. Tidak kalah penting juga dengan membangun ekosistem pariwisata yang baik sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan wisatawan untuk memilih kabupaten Lombok Tengah sebagai destinasi yang tepat.

Secara keseluruhan, meskipun sektor pariwisata sudah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, pengelolaan yang lebih baik dan berbasis digital perlu

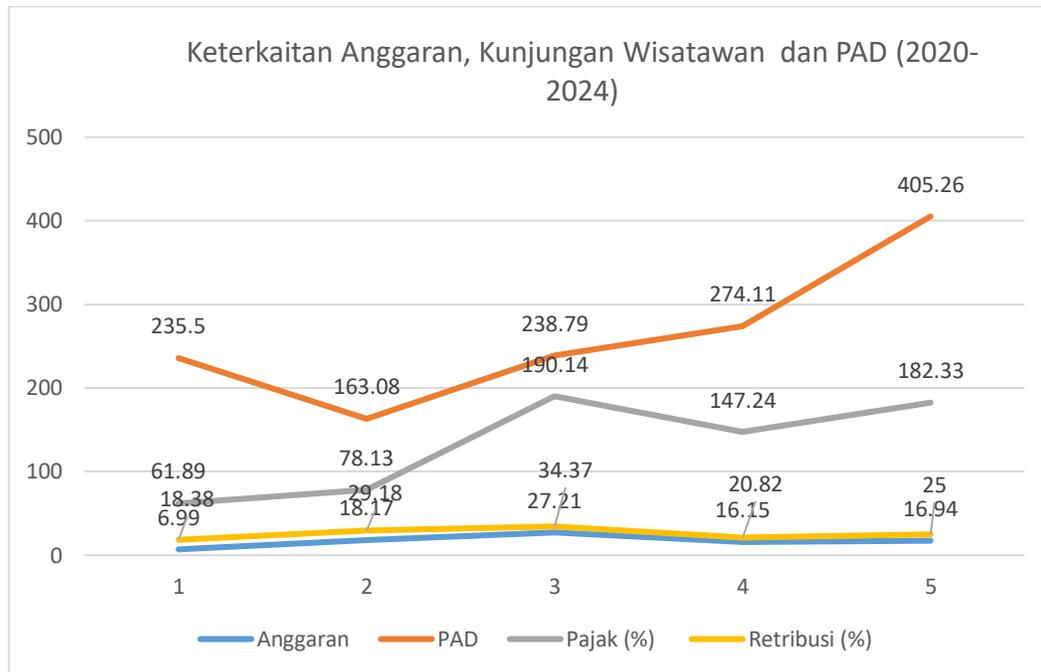
diperhatikan agar kebocoran pajak dan retribusi dapat diminimalkan dan manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat lokal.

4. Analisis Keterkaitan: Anggaran – Pariwisata – PAD

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara besaran dan ketepatan alokasi anggaran dinas teknis dan keberhasilan pengembangan KEK Mandalika, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap peningkatan PAD dari sektor pariwisata. Hal yang perlu diperhatikan dari data yang ada bahwa PAD kabupaten Lombok Tengah terus meningkat, akan tetapi di saat yang bersamaan jumlah pendapatan yang bersumber dari pajak mengalami penurunan. Pada tahun 2024 PAD mencapai level tertinggi yaitu 405,26 Milyar, naik dari 4 tahun sebelumnya. Sedangkan pendapatan utama daerah yang bersumber dari pajak mengalami fluktuasi yaitu mencapai level tertinggi di tahun 2022 sebesar 190,14 Milyar lalu menurun pada tahun berikutnya menjadi 147,24 Milyar. Angka ini sangat berbanding terbalik dengan data kunjungan wisatawan yang meningkat pada tahun tersebut yakni 1.019.617 orang dari 483.022 orang, artinya dalam konteks ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak tercermin dari peningkatan penerimaan pajak maupun retribusi. Seharusnya, seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, meningkat juga pendapatan daerah dari pajak yakni pajak hotel dan pajak restoran. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut :



Gambar 1 : Grafik kunjungan Wisatawan di Lombok Tengah



Gambar 2 : Grafik Anggaran, PAD, Pajak dan Retribusi

Walaupun demikian, pada tahun 2024 jumlah Anggaran dinas pariwisata, kunjungan wisatawan dan PAD kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan. Selain itu, sumber utama PAD yaitu pajak dan retribusi juga mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Artinya, alokasi anggaran yang tepat untuk sektor pariwisata akan mendorong kunjungan wisatawan yang pada akhirnya akan menyumbang pendapatan pajak berupa pajak hotel dan restoran. Hal ini sesuai dengan teori pembangunan pariwisata dan fiskal daerah yang menyatakan bahwa intervensi kebijakan melalui anggaran publik dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi sektoral.

Pembahasan ini memperkuat pentingnya sinergi lintas sektor dan perencanaan anggaran berbasis output. Ke depan, keberhasilan pembangunan pariwisata di KEK Mandalika sangat bergantung pada konsistensi kebijakan anggaran, kualitas implementasi program, serta keberlanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan sosial kawasan wisata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan sektor pariwisata tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan alokasi anggaran yang tepat, khususnya dari dinas-dinas teknis yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan destinasi. Dalam konteks anggaran, pemerintah kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pariwisata telah mendorong pengembangan KEK Mandalika dengan alokasi anggaran yang terus meingkat, akan tetapi, efektivitas pelaksanaan program belum optimal karena penyusunan program kerja dan kegiatan yang tidak langsung

menyentuh akar permasalahan pariwisata, minimnya kreasi dan inovasi serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

Penggunaan anggaran oleh dinas pariwisata telah mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Lombok Tengah dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan tersebut belum optimal karena rasio jumlah kunjungan wisatawan di kabupaten Lombok Tengah berada di posisi 3 dan atau 4 setelah KLU, Kab. Lombok Timur, dan kota Mataram. Hal ini mencerminkan kualitas layanan dan fasilitas yang disajikan pariwisata Lombok Tengah tidak kompetitif. Perlu adanya komitmen dari seluruh pihak untuk melanjutkan Pembangunan dan pengembangan pariwisata dengan meningkatkan SDM, memelihara dan menjaga fasilitas, dan melengkapi wahana-wahana yang mampu meningkatkan pengalaman wisatawan agar lebih tertarik untuk berwisata di kab. Lombok Tengah.

PAD kab. Lombok Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi. Peningkatan tersebut merepresentasikan kenaikan jumlah penerimaan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran. Angka tersebut masih bisa ditingkatkan oleh pemerintah kabupaten Lombok Tengah dengan cara peningkatan kualitas dan daya saing layanan, meningkatkan Kerjasama dengan platform digital sehingga memudahkan konsumen serta informasi mengenai promo lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan digitalisasi dalam system pencatatan dan pembayaran agar tidak terjadi kebocoran.

PAD pemerintah kab. Lombok Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu sejalan dengan peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah. Anggaran tersebut dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas pariwisata. Jumlah wisatawan yang berkunjung di kabupaten Lombok Tengah juga meningkat seiring dengan pengelolaan anggaran yang baik, yang pada akhirnya itu berdampak pada peningkatan PAD khususnya dari pendapatan pajak hotel, restoran dan retribusi pengelolaan pariwisata. Hal itu merupakan wujud pengelolaan anggarannya yang baik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan menambah penerimaan dari sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, M., Hartati, N., & Wijaya, R. (2024). Analisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2013–2022. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Daerah*, 11(1), 55–66.
- Ardana, G. L., Rahmawati, I. N., & Setiawan, T. (2018). Pengaruh pengembangan KEK Mandalika terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 6(2), 101–112.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Rencana pembangunan pariwisata nasional berbasis infrastruktur: Studi pengembangan kawasan prioritas pariwisata*. <https://www.bappenas.go.id>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Inayati, I., & Lalu, W. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan asli daerah di sektor pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 9(1), 45–53.
- Irvan, M., Syarifuddin, S., & Halim, F. (2022). Pengaruh wisatawan asing dan akomodasi terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi kasus KEK Mandalika. *Jurnal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, 4(3), 211–223.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Realisasi APBN untuk proyek strategis nasional 2020–2023*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2024). *Laporan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika tahun 2024*. <https://www.kemendparekraf.go.id>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021, November 12). Presiden resmikan KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat. <https://www.setneg.go.id>
- Lestari, P., Rahayu, D., & Sulaiman, A. (2024). Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018–2022. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 8(1), 19–28.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Masrun, M., et al. (2022). Peran Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok terhadap pengembangan ekonomi lokal (PEL). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 8(1), 75–83. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i1.17>
- Noviaristi, D. (2023). Analisis faktor dan kebijakan penentuan kemandirian keuangan daerah kawasan ekonomi khusus (Studi kasus: Singhasari). *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7(2), 245–268. <https://doi.org/10.22219/jie.v7i02.24615>
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023*. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahmawati, I., & Gunawan, R. (2021). Pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pengembangan pariwisata dan pendapatan asli daerah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Daerah*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jkfekon.v8i1.2021>
- Ramdani, Z. A., Sani, M. R., & Yori, H. (2020). Peran pemerintah dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Planoeearth*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Simatupang, P. (2024). Kinerja Ekonomi dan Pariwisata Paska Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika Lombok 2014-2023.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suartika, I. M. (2019). Kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tujuan wisata utama. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan Daerah*, 10(1), 45–57. <https://doi.org/10.24843/jkpd.2019.v10.i01.p05>
- Tempo.co. (2024, Oktober 01). Akomodasi MotoGP Mandalika 2024 Dinilai Mahal, Ini Tanggapan Kemenpar dan Asosiasi Hotel. <https://www.tempo.co>
- Vinuzia, V. (2023). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dan efektivitas kerjasama pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(2), 162–175.